



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : DEWAN DIREKSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYOFVI FELIENTY
2. Jabatan : DIREKTUR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
3. NHK : 279447

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.856.444.864

1. Bangunan Seluas 47 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.701.091.350
2. Tanah dan Bangunan Seluas 427 m2/251 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.155.353.514

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 499.050.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER SPORT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 288.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT BEBEK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.050.000
3. MOBIL, HONDA CRV JEEP S.C. HDTP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 198.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.339.755.282**D. SURAT BERHARGA** Rp. 2.000.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 10.661.663.696**F. HARTA LAINNYA** Rp. 1.142.239.800

Sub Total Rp. 22.499.153.642

III. HUTANG Rp. 626.346.669**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 21.872.806.973

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.